



EFEKTIVITAS PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PNPM MANDIRI PERDESAAN

The Effectiveness of Returning PNPM Mandiri Woman's Loan Funds in PNPM Mandiri Rural

Mahmud¹, Andi Nuddin², Andi Sitti Halimah³

¹²³ Universitas Muhammadiyah Pare-pare; Indonesia

Email; mahmudthoha75@yahoo.com

Abstract: *Women's Savings and Loans (SPP) is a PNPM-MP program that provides capital to women's groups in the form of savings and loan funds for those who already have a business. In general, the activity aims to develop the potential of rural savings and loan activities, the ease of access to micro-scale business funding, the fulfillment of basic social funding needs, strengthen institutional activities for women, and encourage the prevention of poor households (RTM). The study aims to analyze the effectiveness of loan repayments and describe the obstacles for group members in repaying the loan funds. By the simple analysis, the data obtained from the questionnaire will be tabulated to determine the rate of return on revolving fund loans in the SPP program. The primary and secondary data obtained will be analyzed with a qualitative descriptive analysis by comparing conditions in the field with targets, indicators, and other measures set by PNPM Mandiri in Rural Areas. The study results showed that the effectiveness of loan repayments for the women-only savings and loans group decreased due to the increase in collectibility. On the other hand, the obstacles of repaying loan funds include the number of funds not adjusted to the scale of the business, not having a sense of responsibility in the use and repayment of loan funds, weak knowledge of entrepreneurship, and the inoperability of the joint responsibility system in groups*

Keywords; *Effectiveness of Refunds, PNPM-MP program, Women's Savings and Loans Group (SPP)*

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian merupakan salah satu tulang punggung pembangunan nasional dan implementasinya harus sinergis dengan pembangunan sektor lainnya. Pada hakekatnya, pembangunan pertanian diimplementasikan dalam berbagai kegiatan, seperti penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat dalam kategori miskin, fasilitasi terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas dan kegiatan ekonomi masyarakat, serta penyediaan prasarana dan sarana fisik oleh pemerintah yang mendukung sektor pertanian (Pertanian, 2004). Kegiatan-kegiatan tersebut selanjutnya terintegrasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dengan sumber dana pelaksanaannya dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, kontribusi swasta, maupun swadaya masyarakat.

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menjadi satu program PNPM-MP dalam memberikan modal untuk kelompok perempuan dalam bentuk dana simpan pinjam. Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang merupakan salah satu wilayah sasaran dari program ini. Penyaluran pinjaman dana bergulir kelompok SPP diberikan melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada masing-masing kelompok simpan pinjam setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.



Berdasarkan Data UPK PNPM Kecamatan Patampanua, jumlah kelompok SPP pada tahun 2015 berjumlah 3 kelompok, tahun 2016 berjumlah 10 kelompok, tahun 2017 berjumlah 44 kelompok, dan tahun 2018 berjumlah 38 kelompok. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa sejak tahun 2015 sampai 2017, jumlah kelompok SPP di Kecamatan tersebut cenderung mengalami peningkatan meskipun terjadi penurunan di tahun 2018.

Meskipun kegiatan SPP di Kecamatan Patampanua telah membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, namun ada pula kelompok SPP yang mengalami kolektibilitas dalam pengembalian dana pinjaman. Kolektibilitas merupakan istilah untuk tersendatnya angsuran pokok dan bunga kredit system pembayaran dari nasabah (Anonim, 2015). Kelompok yang kolektibilitas dalam pengembalian pinjamannya serta susah untuk mendapatkan pinjaman pada periode berikutnya.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mlati-Sleman, Yogyakarta, oleh Purnamasari et al., (2019) mengkaji dampak program Kredit Perempuan (SPP) PNPM MPD terhadap pemberdayaan masyarakat dan mengkaji pelaksanaan program dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Informan adalah ketua SPP PNPM MPD di wilayah Mlati dan enam ketua kelompok SPP. Observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka digunakan untuk memperoleh data. Metode yang digunakan adalah reduksi data, display, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dengan mempertimbangkan batasan riba (riba), dua kontrak dalam satu kontrak, dan jumlah nominal amal yang tidak ditentukan, ekonomi Islam menawarkan *qardhul hasan* dicampur dengan sedekah. Direkomendasikan 1) Pengelola PNPM MPD mengembalikan tujuan awal program (menyimpan dana untuk daerah tertinggal) dan memberikan nilai-nilai ekonomi Islam yang dapat diterima semua agama. Tim verifikasi kemudian harus mengonfirmasi prioritas tim yang ada untuk masyarakat miskin. 3) Untuk pemerintahan, mereka harus menjadi pemimpin dan pelayan. 4) Ulama dan dai harus memahami perannya dalam memberikan pendidikan Ekonomi Islam kepada umat. Selanjutnya Fitri et al., (2021) melakukan Analisis SWOT kelompok SPP Nagari Cubadak, yang bermaksud untuk menilai kemungkinan konversi simpan pinjam perempuan konvensional menjadi SPP Syariah. Temuan penelitian menempatkan translasi SPP konvensional menjadi SPP syariah pada Kuadran 1, $0,8 = x$ dan $2,5 = y$. Maka dengan posisi tersebut, kelompok SPP di Nagari Cubadak memiliki peluang besar untuk menjadi kelompok SPP berbasis syariah. Rekomendasi strategis adalah memaksimalkan semua kekuatan dan peluang untuk mengubah grup SPP menjadi grup SPP Syariah. Pendekatan tersebut harus mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth-oriented strategy). Aminadi et al., (2021) juga melakukan penelitian terhadap topik yang sama, Penelitian ini berusaha untuk menilai kinerja keuangan UPK DAPM-ANM Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif untuk menganalisis pengelolaan keuangan dan pengelolaan pinjaman tahun 2017-2019 berdasarkan PTO PNPM tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas simpan pinjam di UPK DAPM-ANM Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2017-

2019 adalah likuid atau sehat, dengan 88,54 persen dalam pengelolaan keuangan dan 87,5 persen dalam pengelolaan pinjaman. Widanarto & Sudibia (2016) dengan judul penelitian “Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan” menyatakan bahwa tingkat efektivitas program SPP di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung sangat efektif serta dampak program terhadap pendapatan dan kesempatan kerja perempuan adalah positif dan signifikan pada alpha 5 persen. Penelitian-penelitian di atas berfokus pada pengembangan SPP di berbagai daerah, terdapat pula riset yang mengaji SPP dalam perspektif ekonomi Islam. Riset yang dilakukan oleh peneliti, berfokus pada efektivitas pengembalian dana dari Kelompok SPP yang merupakan bagian dari Program PNPM.

Merujuk pada kondisi tersebut, penelitian ini dianggap penting untuk efektifitas pengembalian dana pinjaman kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Patampanua, sehingga eksistensi program bisa membantu masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya kategori miskin di wilayah ini.

METODE

Penelitian ini dimulai pada Desember 2019 hingga Januari 2021 di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah survey, yaitu bersifat pengumpulan fakta di lapangan untuk mengetahui efektifitas pengembalian dana serta klasifikasi kelompok SPP yang efektif dalam pengembalian pinjaman dana. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari, observasi, wawancara dan dokumentasi yang dipandu dengan kuesioner dengan pertanyaan tertutup yang berisi informasi mengenai responden, sedangkan data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari sumber kedua, misalnya dari dokumen Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Kecamatan Patampanua, pemerintah setempat atau data yang diperoleh dari badan atau lembaga yang aktivitasnya mengumpulkan data atau keterangan yang relevan dengan masalah penelitian (Bungin, 2012).

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Patampanua yang diketahui sebagai jumlah kelompok SPP terbanyak dibandingkan kecamatan lain yang ada Kabupaten Pinrang. Terdapat 152 orang anggota kelompok SPP yang aktif sejak 2015 dan tersebar di Kecamatan Patampanua. Sampel diambil masing-masing 6 orang sebagai sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Penentuan sampel diberikan kepada ketua kelompok, bendahara, sekretaris, dan tiga anggota SPP dari tiap kelompok.

B. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dengan matematika sederhana, data yang diperoleh dari kuisisioner ditabulasi untuk mengetahui tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir dalam program SPP. Data primer dan sekunder yang diperoleh dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dengan cara membandingkan kondisi di lapangan

dengan sasaran, indikator dan ukuran lain yang ditetapkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Teknik perhitungan untuk mencari ukuran efektifitas yang merujuk pada Pujiati (2013) dengan formulasi:

$$\text{ratio efektifitas} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

PEMBAHASAN

A. Landasan Teori PNPM-MP

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal menyejahterakan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan PNPM-MP mengacu pada landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya, landasan ideologi pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Indonesia memiliki problem mengenai kemiskinan maupun pengangguran (Yani, 2018).

1. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

SPP merupakan program untuk usaha keluarga melalui kelompok yang dibentuk perempuan yang berupa simpan pinjam. Dana tersebut akan diberikan dalam bentuk bantuan kredit untuk membuka usaha keluarga melalui kelompok yang dibentuk perempuan.

Sasaran kegiatan SPP yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM) yang produktif dan memerlukan pendanaan kegiatan usaha/kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada dimasyarakat. Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman (Anonim, 2015).

2. Pinjaman Dana Bergulir

Kegiatan pinjaman dana bergulir yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana BKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Secara umum pinjaman bergulir adalah pinjaman dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang diberikan kepada masyarakat miskin melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Anonim, 2015).

3. Konsep Efektivitas

Suatu organisasi secara keseluruhannya dalam kaitannya dengan efektivitas adalah mencapai tujuan organisasi. Jika tiap-tiap individu berperilaku atau bekerja efektif dalam mencapai tujuannya, maka kelompok dimana ia menjadi anggota juga efektif dalam mencapai tujuan, organisasi itu juga efektif mencapai tujuan (Rivai, 2012). Efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai

dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat (1986) dan Danfar (2009) dalam Aulizul (2014) yang menjelaskan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

4. Indikator Kesejahteraan

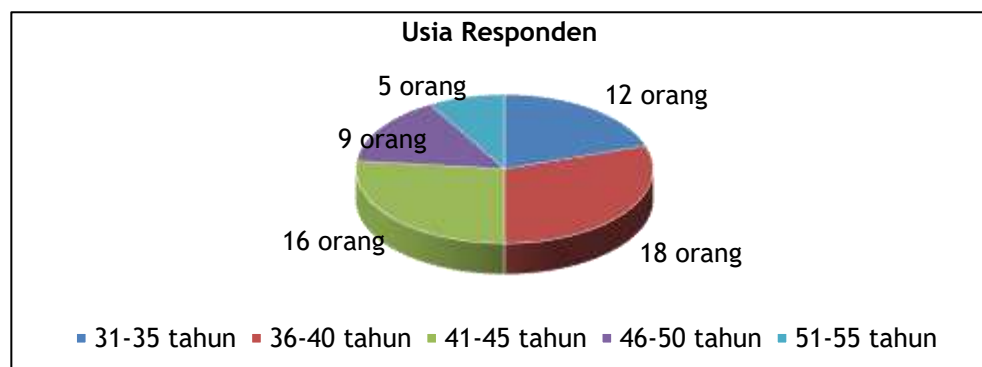
Sejahtera merupakan keinginan setiap manusia, dan kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan lain sebagainya. Kesejahteraan dalam rumah tangga menurut Santamarina, et al.(2006) dalam Listria (2016), dapat dibedakan menjadi kesejahteraan ekonomi (*family well-being*) yang diukur dari pemenuhan input keluarga (misalnya diukur dari pendapatan, upah, aset dan pengeluaran keluarga) dan kesejahteraan material (*family material well-being*) yang diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa yang diakses oleh keluarga. Pengukuran kesejahteraan material relatif lebih mudah dan akan menyangkut pemenuhan kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan materi, baik sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan keluarga yang dapat diukur dengan materi. Secara umum pengukuran kesejahteraan material ini dapat dilakukan dengan mengukur tingkat pendapatan.

B. Gambaran Umum Lokasi

Kecamatan Patampanua terletak sekitar 7 km arah timur kota Pinrang yang terletak antara 4°10' 30" - 30°19' 13" Lintang Selatan dan 119°26' 30" - 119°47' 20" Bujur Timur dengan Ibukota Kelurahan Teppo seluas 136,85km². Kecamatan Patampanua terdiri dari 7 Desa yang terbagi menjadi 20 dusun, 4 kelurahan, dan 13 lingkungan. Dengan jumlah penduduk 32.645 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup sebanding, yaitu 15.823 orang laki-laki dan 16.822 orang perempuan.

1. Karakteristik Responden

a Usia



Gambar 1. Karakteristik Responden Menurut Usia

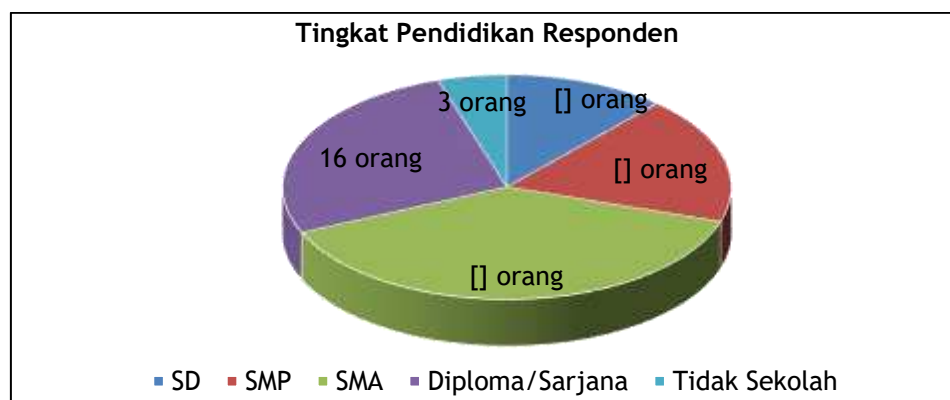
Gambar 1 menunjukkan karakteristik responden menurut usia. Kuesioner diberikan kepada 60 ibu rumah tangga anggota SPP di Kecamatan Patampanua berusia 31 - 45 tahun. Responden paling banyak berusia 36-40 tahun

yaitu sebanyak 18 orang, di mana usia tersebut terbilang produktif untuk membuat usaha. Dari penelitian yang dilakukan diketahui juga bahwa responden yang berusia diatas 50 tahun tersebut tidak memiliki usaha, melainkan hanya meminjam dana SPP saja untuk kebutuhan rumah tangganya.

Faktor usia sangat berpengaruh terhadap produktivitas seseorang dalam melakukan aktivitas kerja. Semakin bertambah usia seseorang maka produktivitas juga bertambah, namun melewati usia tertentu produktivitas seseorang juga akan menurun.

b Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui bahwa anggota kelompok SPP yang merupakan lulusan SMA lebih banyak dibanding yang lain yaitu sebanyak 23 orang atau 38.33% dari total 60 responden. Menurut Mulyasari (2015), pendidikan seseorang umumnya mempengaruhi cara dan pola pikir dalam mengelola usahanya dan akan berpartisipasi aktif juga dalam suatu kegiatan. Dengan kondisi pendidikan yang semakin tinggi akan mempengaruhi pola pikir anggota untuk lebih mudah menerima inovasi baru seperti adanya bantuan dana dari kegiatan SPP. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini:

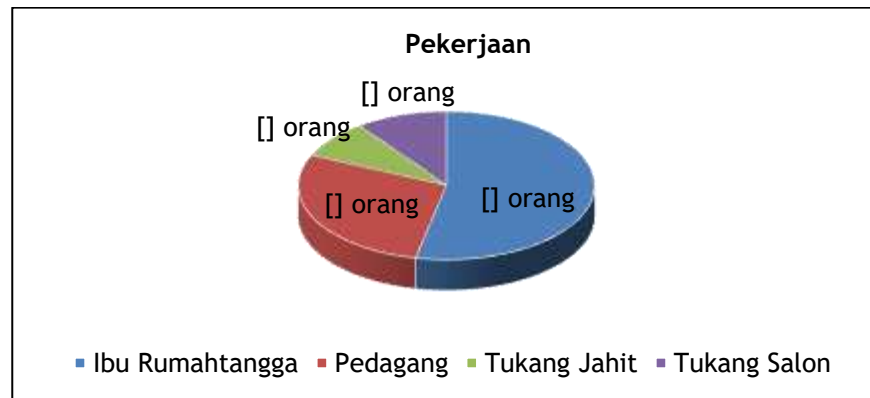


Gambar 2. Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan

c Pekerjaan

Jenis pekerjaan responden anggota kelompok SPP di Kecamatan Patampanua sangat beragam, meski demikian tidak ditemui responden yang bekerja sebagai PNS. Pada Gambar 3, terlihat bahwa jenis pekerjaan dari anggota-anggota kelompok SPP sebagian besar sebagai ibu rumah tangga yaitu 32 orang atau sekitar 53% dari total responden. Para ibu rumah tangga rata-rata menjalankan usaha di rumah masing-masing seperti usaha kios pulsa, warung sembako, kedai kue, dan sebagainya. Sedangkan yang bekerja sebagai pedagang di pasar sebanyak 16 orang diantaranya sebagai penjual ikan, sayur dan buah, penjual baju dan kain. Sebanyak 8 orang tukang jahit dan 4 orang lainnya sebagai tukang salon. Adapun pekerjaan suami dari responden juga beragam,

22 orang bekerja sebagai buruh bangunan, sebagian lagi peternak, pedagang, supir, dan petani.

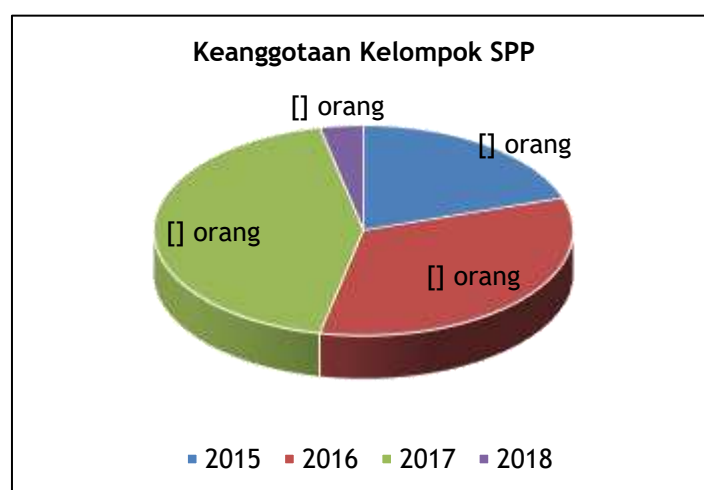


Gambar 3. Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan

2. Alokasi Pinjaman Dana Bergulir Kelompok SPP

a Keanggotaan dalam Kelompok SPP

Hasil kuisisioner terhadap responden di Kecamatan Patampanua diketahui bahwa umumnya responden bergabung menjadi anggota Kelompok SPP pada Tahun 2017 sehingga jumlah kelompok pun di tahun tersebut meningkat sebanyak 44 kelompok yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan ini. Responden yang bergabung menjadi anggota kelompok SPP pada Tahun 2015 menjelaskan jika jumlah mereka tidak seperti sekarang sehingga hanya sedikit masyarakat yang mendapatkan dana pinjaman. Tahun 2016 jumlah keanggotaan SPP sedikit meningkat, dimana masyarakat sudah banyak yang mengetahui adanya program pinjaman dana bergulir kelompok SPP. Karakteristik responden menurut keanggotaan kelompok dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Karakteristik Responden Menurut Keanggotaan Kelompok

b Jumlah Pinjaman Dana yang Diterima Kelompok

Terdapat 2 kelompok yang diketahui menerima pinjaman Rp≤10 juta dan 1 kelompok SPP yang menerima pinjaman Rp11,000,000 - Rp20,000,000 pada

tahun 2015. Setiap tahun jumlah dana pinjaman bergulir yang diterima kelompok SPP semakin meningkat, terlihat pada Tahun 2016 pinjaman kelompok SPP mencapai Rp20,000,000 bahkan Tahun 2018 jumlah pinjaman yang diterima setiap kelompok mencapai Rp50,000,000. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan pihak UPK di Kecamatan Patampanua untuk memberikan dana pinjaman tersebut dengan jumlah yang lebih besar. Pada tahun 2017 terdapat kelompok yang mendapat pinjaman dana 2 kali dalam setahun. Tabel 1 menunjukkan data jumlah pinjaman dana yang diterima Kelompok SPP.

Tabel 1. Jumlah Pinjaman Dana yang Diterima Kelompok SPP

Tahun	Jumlah Pinjaman Dana Kelompok SPP (dalam juta Rupiah)					
	≤10	11- 20	21-30	31-40	41-50	>50
2015	2	1	-	-	-	-
2016	2	6	2	-	-	-
2017	-	12	8	4	-	-
2018	-	-	-	1	8	6

Sumber: UPK

c Jumlah Pinjaman Dana yang Diterima Anggota Kelompok

Diketahui dari hasil wawancara, setiap tahun jumlah dana pinjaman yang diterima anggota SPP semakin meningkat, hal ini berarti para anggota kelompok SPP sudah mampu mengelola dana pinjaman dalam skala yang lebih besar. Pada tahun 2017 terdapat 6 responden yang mendapat pinjaman dana 2 kali dalam setahun. Hal ini berarti anggota sudah mampu mengembalikan pinjaman dana tersebut sebelum batas akhir waktu pengembalian sehingga bisa mengajukan pinjaman dana berikutnya. Distribusi pinjaman dana kelompok SPP yang diterima responden berdasarkan kuisioner dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Pinjaman Dana yang Diterima Responden Anggota Kelompok SPP

Tahun	Jumlah Pinjaman Dana yang Diterima Responden (dalam juta Rupiah)					
	≤1	1,1- 2	2,1-3	3,1-4	4,1-5	>5
2015	10	5	-	-	-	-
2016	4	8	4	-	-	-
2017	-	10	7	4	-	-
2018	-	-	-	2	4	6

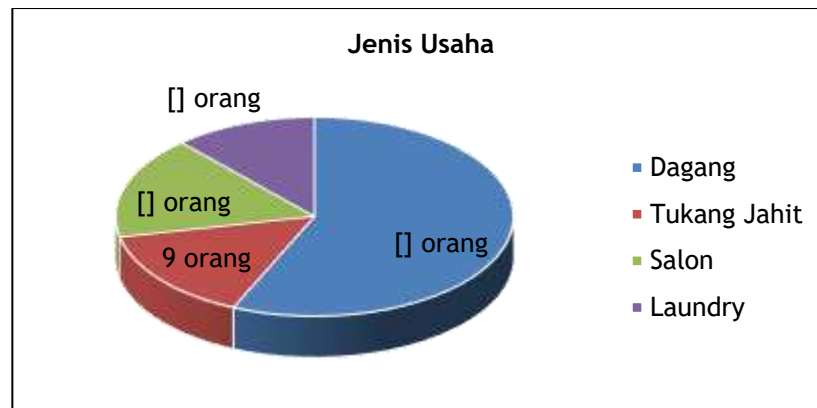
Sumber : Data primer yang diolah, 2019

3. Usaha Kelompok SPP

a Jenis Usaha

Data kuisioner responden menggambarkan jenis usaha yang mereka lakukan dengan modal pinjaman dana bergulir dari program PNPM-Mandiri di Kecamatan Patampanua dengan tujuan sebagai upaya pembedayaan perempuan perdesaan dalam membantu meningkatkan ekonomi keluarga dan

mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja (A. Yani, dkk., 2015). Berdasarkan Gambar 5, sebanyak 63.33% responden memilih usaha berdagang dengan alasan pinjaman dana dapat langsung dikelola dan cepat mendapatkan untung. Usaha dagang yang dikembangkan cukup variatif mulai dari usaha dagang kue sebagai home industry, kios pulsa, warung sembako, warung makan/kopi, dsb. Responden lainnya ada yang memilih untuk mengembangkan kemampuannya dalam menjahit, ada juga yang membuka usaha salon dan laundry.



Gambar 5. Karakteristik Responden Menurut Jen

b Pendapatan Atas Usaha

Secara umum responden menyatakan jika pendapatan mereka dari usaha yang dijalankan bisa menambah pendapatan dan memenuhi kebutuhan sekunder rumahtangga mereka. Hal ini diakui sebagian besar responden bahwa besaran pendapatan mereka meningkat dibanding sebelum menerima pinjaman dana bergulir SPP. Besaran tersebut mencapai \geq Rp1.000.000 per bulan sehingga bisa dianggap dana yang mereka pinjam dapat dikelola dengan baik. Karakteristik responden menurut pendapatan usahanya dapat dilihat pada Gambar 6 sebagai berikut:

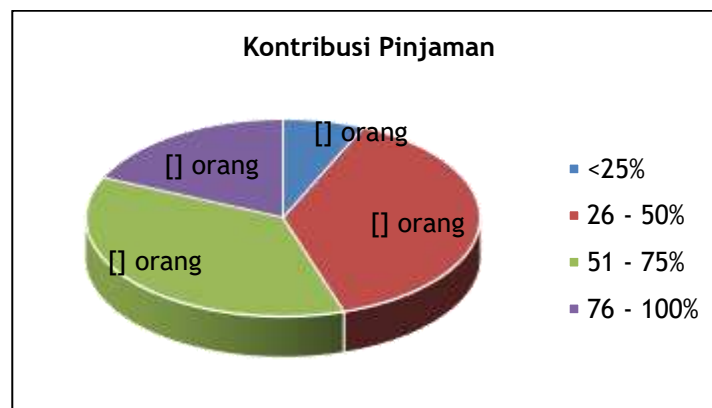


Gambar 6. Karakteristik Responden Menurut Pendapatan Usaha

c Kontribusi Pinjaman dalam modal Usaha

Sebanyak 45 responden mengakui jika pinjaman dana bergulir SPP berkontribusi sekitar 26-75% terhadap usaha yang mereka kelola. Sedangkan 4

responden menyatakan kontribusi dana SPP terhadap usaha yang dikelola hanya 25% bahkan kurang, hal ini memungkinkan bagi mereka yang menggunakan pinjaman tersebut sebagai tambahan modal utama yang telah dimiliki dan dikelola sebelumnya. Ada juga responden yang menganggap pinjaman dana bergulir SPP berkontribusi sebesar 76-100%, hal ini berarti responden memulai usahanya sejak mendapatkan pinjaman tersebut. Distribusinya dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Karakteristik Responden Menurut Kontribusi Pinjaman

C. Efektifitas Pengembalian Dana Pinjaman Kelompok SPP di Kecamatan Patampanua

Kelompok SPP dikhususkan bagi perempuan untuk mengakomodir kegiatan ekonomi dan diharapkan berimplikasi pada peningkatan pendapatan rumah tangga dan mengurangi kemiskinan (Widanarto & Sudibia, 2016). Sejak tahun 2015, kaum perempuan (secara berkelompok) di Kecamatan Patampanua memiliki kesempatan untuk memperoleh modal. Rekap data dari kuesioner yang telah diberikan kepada 60 responden sebagai anggota kelompok SPP di Kecamatan Patampanua memberi informasi jika syarat untuk mengajukan pinjaman dana bergulir itu cukup mudah.

Efektivitas pengembalian pinjaman oleh kelompok SPP menggambarkan realisasi pengembalian pinjaman yang direncanakan dibandingkan dengan target pengembalian pinjaman yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari UPK terkait kolektibilitas termasuk sanksi bagi para anggota kelompok yang menunggak. Dari Laporan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Kelompok SPP PNPM-Mandiri, UPK Kecamatan Patampanua mengakui ada peningkatan yang baik dalam ketepatan waktu pengembalian pinjaman dana pokok meski target pengembalian bunga pinjaman masih ada yang menunggak. Hal ini menunjukkan bahwa pinjaman dana yang diberikan cenderung belum mampu dikelola dengan baik sehingga masih dibutuhkan pendampingan dalam upaya meningkatkan pendapatan rumah tangganya. Ratio efektivitas pengembalian pinjaman dana di Kecamatan Patampanua dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Ratio Efektivitas Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Kelompok SPP di Kecamatan Patampanua Dalam 3 Tahun Terakhir

Tahun	Target Pengembalian	Realisasi Pengembalian	Ratio Efektivitas (%)
2016	33,750,000	28,195,000	83.54
2017	177,000,000	117,000,000	66.10
2018	627,000,000	387,000,000	61.72
2019	697,000,000	375,000,000	53.80

Sumber: Data Diolah, 2020

Melalui dana tersebut, anggota kelompok SPP di wilayah ini dapat menggunakannya untuk kegiatan ekonomi produktif yaitu membuka usaha maupun menambah modal usaha yang telah ada dan bukan untuk konsumtif. Kondisi tersebut terlihat pada Tahun 2016, dimana realisasi pengembalian pinjamannya relatif berjalan lancar. Proses pengembalian modal dilakukan setiap bulan, dimana jumlah setoran menurun 2% setiap bulan selama 10 bulan dengan tujuan agar perguliran dana tidak terhambat (Pangemanan dkk., 2014).

Pengelolaan pinjaman dana bergulir secara optimal pada kelompok SPP, dapat menekan jumlah tunggakan. Dalam pemberian pinjaman, UPK harus yakin akan kesanggupan kelompok dan anggotanya untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga yang telah ditentukan. Pada Tabel 3 terlihat bahwa Tahun 2017 - 2019, jumlah dana pinjaman bergulir semakin meningkat namun seiring bertambahnya kolektibilitas anggota kelompok SPP. Tidak sedikit responden yang mengakui jika pengelolaan dana yang diterima digunakan untuk berbagai kebutuhan yang mendesak, sehingga usaha yang ada belum bisa berkembang dengan baik karena pengetahuan dalam berwirausaha juga terbatas meski modal sudah bertambah. Disamping itu, responden masih banyak yang belum memahami pengembalian pinjaman tersebut karena masih beredar anggapan jika pinjaman kelompok SPP merupakan dana hibah pemerintah sehingga beberapa masih ragu dalam pengembalian. Larasati & Yudhananta, (2016) menjelaskan pengelolaan dana bergulir bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam, memudahkan akses pendanaan usaha, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dalam mengurangi Rumah Tangga Miskin (RTM). Pengembalian pinjaman dana bergulir yang diterima anggota kelompok SPP berdasarkan informasi responden terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengembalian Pinjaman Responden

Tahun	Pengembalian Pinjaman Dana Kelompok SPP				
	Lancar/TepatWaktu	1 kali	2 kali	3 kali	4 kali
2016	28	22	8	2	-
2017	17	19	15	9	-
2018	8	14	15	12	11
2019	8	10	10	14	18

Sumber : Data Primer Diolah, 2020.

Data Tabel 4.4 menggambarkan jumlah responden yang cukup banyak menunggak dengan alasan bahwa pinjaman itu merupakan dana pemerintah yang dapat dikelola secara leluasa tanpa harus dikembalikan sesuai waktu. Mereka bahkan

yakin kalau pinjaman tersebut segera diputihkan oleh pemerintah. Informasi inilah yang kemudian menuntut UPK PNPM Mandiri memberi penjelasan secara mendalam kepada para anggota kelompok SPP agar mereka mampu bertanggung jawab dalam pengelolaan pinjaman dana tersebut dan berkewajiban penuh untuk melakukan pengembalian pokok dan bunga sesuai aturan yang disepakati. Hasil ini serupa dengan hasil penelitian Nudiawati dkk (2019) bahwa penyebab macetnya pengembalian pinjaman adalah adanya informasi yang tidak benar yang beranggapan jika dana ini adalah dana hibah yang diberikan oleh pemerintah yang tidak perlu dikembalikan. Demikian pula yang ditemukan dari hasil penelitian Misrah (2014), terjadinya tunggakan pembayaran dana pinjaman PNPM tersebut adalah kurangnya pemahaman dan pengertian masyarakat, adanya kebutuhan yang penting dari pada membayar angsuran, dan adanya penyalahgunaan angsuran yang masuk pada ketua kelompok dari masing-masing desa.

UPK Kecamatan Patampanua telah meminimalisir tunggakan atau kolektibilitas dengan memberi keringanan kepada kelompok SPP berupa cicilan terhadap pinjaman pokok dengan menambah waktu tolenransi selama dua pekan. Meski telah menata ulang aturan pinjaman dana bergulir kepada kelompok SPP yang memiliki pemahaman terhadap program termasuk tanggung jawab pengelola dana dan pengembalian pinjaman tepat waktu yang disepakati, namun hal tersebut belum menunjukkan perubahan yang berarti dalam sistem pengembalian pinjaman dana kelompok SPP. Menurut Larasati & Yudhananta (2016) upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan tunggakan, yaitu: *Rescheduling* (penjadwalan ulang jangka waktu pinjaman dan/atau jangka waktu angsuran), *Restructuring* (penataan kembali lembaga yang terkait), *Reconditioning* (mengondisikan kembali dana yang masih ada seperti kondisi awal), Kompensasi harta/penyitaan jaminan, dan upaya penerapan sanksi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang menyebabkan tunggakan atau kredit bermasalah.

Klasifikasi kelompok yang terbilang efektif dalam penelitian ini terkait pengembalian pinjaman dana bergulir kelompok SPP di Kecamatan Patampanua berdasarkan informasi UPK dan kuisisioner responden dapat diketahui bahwa:

1. Jenis usaha dagang menjadi pilihan dominan yang dilakukan.
2. Pinjaman dana yang diterima responden dari kelompok yang berhasil, umumnya menggunakan pinjaman dana tersebut sebagai modal pengembangan usaha.
3. Dukungan suami mereka ikut menentukan semangat usaha yang dilakukan karena umumnya responden mengakui adanya keterlibatan suami dalam pengembangan usaha.

D. Kendala bagi kelompok dalam pengembalian pinjaman dana SPP PNPB Mandiri di Kecamatan Patampanua

Responden mengakui jika mereka meminjam dana bergulir kelompok SPP PNPB Mandiri karena cukup mudah dalam mendapatkannya, persyaratan pengajuannya ringan, prosesnya mudah, walaupun proses pencairannya lama. Dari penelitian Hamdi dkk (2013) mencatat bahwa 100% anggota kelompok SPP mau meminjam dana tersebut karena persyaratan pengajuannya mudah dan pinjaman dana tersebut mampu meningkatkan omset dan keuntungannya meningkat dari sebelumnya, namun tidak sedikit anggota kelompok yang menerima pinjaman dana bergulir kelompok SPP mengalami kendala sehingga kesulitan dalam membayar angsurannya sesuai waktu yang telah disepakati. Dalam penelitian ini diketahui ada beberapa faktor yang menjadi kendala responden, yaitu:

1. Tunggakan/kolektibilitas atas pengembalian pinjaman yang disebabkan oleh jumlah dana tidak disesuaikan dengan skala usaha yang dilakukan anggota kelompok.
2. Beberapa anggota kelompok terkesan hanya memanfaatkan kesempatan dalam pinjaman dana itu, sehingga terkesan mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam penggunaan dan pengembalian uang simpan pinjam.
3. Lemahnya pengetahuan dibidang wirausaha.
4. Tidak berjalannya sistem tanggung renteng dalam kelompok. Hal ini terkait kurangnya kesadaran menabung dalam kelompok untuk membantu anggota yang belum mampu melunasi pinjamannya, anggota yang pindah domisili atau yang meninggal.

Berakhirnya PNPB Mandiri Perdesaan cukup mempengaruhi program SPP karena kegiatan pengembalian pinjaman dana bergulir belum dapat ditangani oleh UPK sekalipun dibawah pengawasan BKAD. Masih diperlukan pendampingan yang serius dalam keberlangsungan program SPP di Kecamatan Patampanua, tidak semata-mata tanggung jawab BKAD dan UPK tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah kecamatan dan masyarakat sendiri sehingga dibutuhkan kerjasama antar *stakeholder* dimaksud.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah efektivitas pengembalian pinjaman dana kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang mengalami penurunan, dimana terjadi peningkatan kolektibilitas dan kendala pengembalian pinjaman dana tersebut di antaranya jumlah dana tidak disesuaikan dengan skala usaha, tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam penggunaan dan pengembalian pinjaman dana tersebut, lemahnya pengetahuan dibidang wirausaha, serta tidak berjalannya sistem tanggung renteng dalam kelompok.

Untuk ke depannya, peneliti menyarankan sebaiknya pelatihan, khususnya terhadap kelompok yang kolektibilitas untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang baik dan benar, diadakan secara rutin oleh pemerintah agar usaha-usaha yang dijalankam oleh anggota kelompok SPP dapat dikelola dengan baik dan berkembang. Selain itu, setiap pengajuan pinjaman hendaknya pihak UPK melakukan tinjauan terhadap usaha dari peminjam ataupun yang akan memulai usaha dari modal yang akan dipinjamkan, sehingga pinjaman dana tepat sasaran.

BIBLIOGRAFI

- Aminadi, I., Sholeh, A., & Ferina, Z. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pada Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Dapm-Anm Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i2.1383>
- Anonim. (2015). Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Pengelolaan Dana Bergulir. *Tim Koordinasi PNPM - Departemen Dalam Negeri*.
- Aulizul, S. (2014). Efektifitas Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang Panjang. *Jurnal Studi Pembangunan*, 4.
- Bungin, B. (2012). Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. *Prenadamedia Group*.
- Fitri, S., Mariko, S., & Nasfi, N. (2021). Potensi Transformasi SPP Konvensional Menjadi SPP Syariah Melalui Analisa Swot (Studi Pada Kelompok SPP Nagari Cubadak). *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 9(3), 301-309. <https://doi.org/10.31846/jae.v9i3.419>
- Hamdi, Hardjomidjojo, H., & Saleh, A. (2013). Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan di Kecamatan Semparuk, Sambas. *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 8(2), 155-169. <https://doi.org/10.29244/mikm.8.2.155-169>
- Larasati, R. D., & Yudhananta, S. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meminimalkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar). *Jurnal Kompilek*, 8.
- Listria, R. L. (2016). *Pengaruh Program Simpan Pinjam Terhadap Kesejahteraan Anggota Kelompok SPP di UPK Mandiri Sejahtera Binangun Kabupaten Cilacap*. Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- Misrah. (2014). Efektivitas Pengembalian Piutang Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pada Unit Kegiatan PNPM Kabupaten Pohuwato. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 11.
- Mulyasari, G. (2015). Kajian Partisipasi Perempuan Terhadap Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Di Kota Bengkulu. *JSEP*, 8.
- Nudiawati, Afendi, F. M., Setiawan, M. B., Heriwibowo, D., Zuelkiflimansyah, & Witarto, A. B. (2019). Inovasi Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (Spp)

- pada Unit Pengelola Kegiatan (Upk) di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Distribusi*.
- Pangemanan, I. L. R. J., Ngangi, I. C. R., Tangkere, E. G., & Ekonomi, J. S. (2014). Efektifitas Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Cocos*, 4(4).
- Pertanian, D. (2004). *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pertanian*.
- Pujiati, T. (2013). Analisis Kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik). *Publika*, 1.
- Purnamasari, S. A., Fachrudin, A., & Wijaya, A. (2019). The Implementation of Women's Saving and Loan Of PNPM MPD In Mlati District - Sleman Viewed From The Perspective Of Islamic Economics. *Tirtayasa Ekonomika*, 14(1), 141. <https://doi.org/10.35448/jte.v14i1.5417>
- Rivai, V. (2012). *Kepemimpinan dan Perilaku*.
- Widanarto, M. V. C., & Sudibia, K. (2016). Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Yani, A., G.S, B., & Achmadi. (2015). Pengaruh SPP PNPM-Mandiri Perdesaan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Anggota Kelompok Di Kecamatan Pinoh Utara. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 4.

COPYRIGHT

Copyright (c) 2022 Author Name



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).